



Rapat DPD Soal Reklamasi Teluk Benoa (2-Habis)

## Bendesa Adat Pertanyakan Perwakilan Pro-Reklamasi

**PERTEMUAN** bersama pihak-pihak dalam rencana reklamasi Teluk Benoa yang digelar Komite II DPD, Rabu (15/4), berlangsung alot. Dua kubu yang pro dan kontra reklamasi saling adu argumentasi. Mereka yang menolak reklamasi dimotori oleh ForBALI. Mereka beranggotakan sekitar delapan orang perwakilan. Antara lain akademisi dari Universitas Udayana (Unud), Walhi Bali, serta sejumlah bendesa adat yang membawa mandat surat tugas resmi. Sementara dari pihak pengembang, Direktur Umum PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) Heru B Wasesa memperkenalkan tim kajiannya dari beberapa

akademisi sejumlah perguruan tinggi minus akademisi dari Unud, direksi PT TWBI dan perwakilan masyarakat Bali.

Kedua orang yang diperkenalkan TWBI sebagai perwakilan rakyat Bali sempat dipertanyakan oleh sejumlah bendesa adat. Sebab, keduanya tidak bisa menunjukkan surat mandat dari desa yang diwakili. Dua orang perwakilan yang mengatasnamakan masyarakat Bali itu adalah Turah Pelayun yang mengaku sebagai *undagi* dan Komang Budi Subudi dari Yayasan Bumi Bali Bagus.

**Hal. 23**

**Semua Pihak**

### Semua Pihak

#### Dari Hal. 1

Saat diberi kesempatan memberikan presentasinya, Turah mengajak semua pihak untuk memperbaiki alam di Bali, khususnya lingkungan di sekitar Teluk Benoa yang harus segera dibenahi dan diperbaiki. "Di Teluk Benoa, perlu ada revitalisasi. Kami selaku masyarakat Bali ingin adanya revitalisasi, menjadikannya sebagai pulau yang memiliki budaya khas Bali," kata Turah.

Langkah itu, menurutnya, sesuai dengan konsep Tri Hitna Karana sebagai ajaran yang diyakini masyarakat Bali. "Kita juga bisa membangun Jagannatha, dan kita minta pihak TWBI menanam tanaman yang diperlukan untuk kelestarian alam," kata Turah.

Usai memberikan tanggapan, *Bali Post* sempat menghampiri Turah. Pada kartu nama yang disodorkan, tertera sebagai arsitek yang memiliki sejumlah keahlian jasa antara lain konsultan, Balinese Architecture, Balinese Landscape, properti dan interior. Saat dikonfirmasi, Turah tetap menegaskan bahwa dirinya sebagai seorang budayawan. "Saya *undagi*, budayawan," katanya sambil tersenyum.

Sejumlah bendesa di dalam rapat sempat mempersoalkan pihak-pihak yang mengatasnamakan orang Bali namun kenyataannya hanya membawa kepentingan pribadi. Made Sugita, Bendesa Adat Kelan, wilayah yang berbatasan langsung dengan Teluk Benoa, mempersoalkan klaim pihak yang dinilainya hanya merepresentasikan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

"Kami sejumlah bendesa adat di sini membawa surat tugas resmi. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku perwakilan mengatasnamakan tokoh, itu tidak benar. Yang benar adalah yang membawa surat resmi dari bendesa adat setempat, ditunjuk karena dianggap mampu bicara di forum tingkat daerah dan nasional, dengan mengatasnamakan masyarakat yang menyatakan menolak reklamasi," kata Sugita.

Dalam forum RDP Komite II DPD tersebut, ForBALI mengajak sejumlah bendesa adat yang wilayahnya bersentuhan langsung dengan Teluk Benoa. Mereka membawa mandat surat resmi dari desanya, antara lain Made Rudita, Sekretaris Desa Pakraman Tanjung Benoa; Kadek Nuasa, Ketua Kelurahan Desa Teluk Benoa; Made Sugita,

Bendesa adat Kelan; dan sejumlah bendesa adat lainnya yang semuanya membawa mandat resmi dari desanya.

Dalam paparannya, Wayan "Gendo" Suardana selaku pimpinan perwakilan masyarakat yang menolak reklamasi menjelaskan hasil studi kelayakan yang dilakukan tim kajian dari Universitas Udayana yang menyatakan reklamasi tidak layak.

Direktur PT TWBI Heru Budi Waseso mengatakan ada dua aspek yang menjadi penekanan reklamasi yaitu kondisi Teluk Benoa saat ini yang sudah rusak dan kedua aspek pemanfaatan. "Oleh karena itu, yang penting ditekankan di sini adalah, sebetulnya apa yang telah terjadi dengan Teluk Benoa saat ini," katanya.

Heru juga mengatakan sebagai pengembang pihaknya berharap kajian analisis dampak lingkungan (amdal) yang saat ini sedang diproses Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Hidup segera diselesaikan. Dia juga meminta semua pihak untuk mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk juga pihak-pihak yang selama ini merasa keberatan. (kmb4)

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal : 1 dan 23



## Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas

# Winasa Merasa Dikriminalisasi

Negara (Bali Post) -

Mantan Bupati Jembrana Prof. Gede Winasa yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (PD), Kamis (16/4) kemarin diperiksa penyidik Kejaksaan. Winasa dikawal dua petugas kepolisian didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh jaksa Nengah Nurlaba.

Kasi Pidsus Putu Sauca Arimbawa Tusan seizin Kajari mengatakan pihaknya mengajukan 28 pertanyaan terhadap tersangka. Sementara Winasa yang mengenakan baju kaos putih garis-garis biru dan celana jeans sesuai diperiksa kepada sejumlah wartawan mengatakan kalau dia tidak terima menjadi tersangka dalam kasus ini. Apalagi katanya tiket yang dipermasalahkan tersebut merupakan tiket palsu dan ada ketidaksamaan dokumen dengan nomor di SPPD.

"Ini yang seharusnya diselidiki oleh penyidik. Saya 10 tahun menjadi bupati tidak pernah beli tiket, yang beli ajudan," jelasnya. Pihaknya juga tidak tahu kalau ada pemalsuan tiket tersebut. "Silakan dijawab sendiri siapa pelakunya. Selama ini bupati hanya terima saja dan duduk di pesawat. Semua diurus ajudan. Itu kalau saya, tidak tahu kalau bupati lain. Yang lucu lagi semua ajudan yang diperiksa mengaku membeli tiket di Amik,

karyawan saya di Denpasar. Itu pegawai Nita Klinik. Dia memang sering bantu saya. Aneh ndak, itu pengakuan tiga ajudan," tandasnya.

Tiket tersebut katanya juga tidak sama dengan apa yang ada di bandara, baik nomor dan namanya. Winasa juga mengatakan kalau dia selama ini tidak pernah menerima surat tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah (TPTGR). "TPTGR tidak pernah saya terima dan tidak pernah diberikan kepada saya. Katanya dikirim ke Tegalcangkring. Di pengakuan Bawasda juga begitu. Tetapi yang terima katanya tetangga saya. Kenapa yang terima penjaga malam. Apakah ini bukan rekayasa namanya," kata Winasa.

Winasa mengaku curiga ini ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya. "Ini semacam rekayasa," kilahnya lagi. Namun, ketika ditanyakan apakah akan melakukan upaya praperadilan, menurutnya itu masalah nanti dan sekarang pihaknya hanya berbicara fakta saja.

Sementara itu, Sauca Arimbawa Tusan mengatakan dalam keterangannya Amik mengakui kalau dia memang yang menyediakan tiket. Tiket tersebut dibeli dari tiga agen. "Para ajudan juga mengaku kalau hanya mengambil dari Amik," jelasnya. (kmb)



## Sebelum Berangkat ke Besakih Sejumlah Pejabat Badung "Diinterogasi" Jaksa

Denpasar (Bali Post) -

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar dipimpin Kasi Intel Syahrir Sagir, Kamis (16/4) kemarin kembali mendatangi Puspem Badung. Menariknya, sejumlah pejabat Pemkab Badung dimintai keterangan sesaat sebelum mereka berangkat ke Pura Besakih. Informasi yang dikumpulkan, tim kejaksaan tiba di kantor yang dipimpin Bupati A.A. Gede Agung yang berlokasi di Sempidi itu sekitar pukul 08.00 Wita. Sementara saat itu, para pejabat di Pemkab Badung sudah berpakaian adat untuk siap-siap berangkat ke Besakih.

Para pejabat di Pemkab Badung itu pun "diinterogasi". Kasi Intel Syahrir Sagir membenarkan kedatangannya ke Badung guna meminta keterangan serta mencari data. Ada empat pimpinan SKPD yang dimintai keterangan, yakni Kadis Kebudayaan, Kabag Keuangan, Kepala Inspektorat dan Kabag Hukum. "Kami menanyakan tentang tirtayatra," katanya.

Yang ditanyakan adalah proses tirtayatra ke India. Jawaban yang didapat jaksa, bahwa tirtayatra menggunakan dana hibah yang masuk ke rekening PHDI Badung. Untuk diketahui, soal dana hibah PHDI itu sudah sempat diaudit BPKP yang kala itu bekerja sama dengan KPK dalam agenda supervisi koordinasi dan pencegahan. Ketika itu, dilakukan secara acak dan kebetulan yang kena dana hibah tirtayatra ke

Inida ini. Usai dimintai keterangan, pejabat pimpinan A.A. Gede Agung itu kemudian berangkat menuju Pura Besakih. Ditanya soal data yang disita saat ke Puspem Badung kemarin, Kasi Intel Syahrir mengatakan bahwa ada sekitar satu bendel.

Atas pemeriksaan itu, *Bali Post* mencoba mengonfirmasi kepada pejabat yang dimintai keterangan oleh kejaksaan tersebut. Namun pernyataan bertolak belakang justru dilontarkan pejabat yang konon PAD-nya tertinggi di Indonesia itu. Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung I.B. Anom Basma justru mengatakan tidak mengetahui perihal tersebut. Namun mengenai kasus dana hibah perjalanan tirtayatra, ia menegaskan telah tuntas. "Saya belum tahu (adanya pemeriksaan - red), nanti saya coba cek lagi. Saya masih di Besakih," katanya singkat.

Bupati Badung A.A. Gede Agung saat dihubungi, juga memberikan alasan serupa dan mengaku sedang ada di Pura Besakih, Karangasem. "Saya masih di Besakih upacara *nganyarin*, saya tidak tahu," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan jika dirinya selalu menghormati proses dan keputusan hukum. "Kan tahu sendiri, dari dulu saya paling taat hukum dan aturan. Dari dulu saya mengikuti dan menghormati hukum," tegasnya.

Berdasarkan informasi, perjalanan tirtayatra ke India menggunakan dana hibah Pemkab Badung kepada PHDI dengan dikoordinir Dinas Kebudayaan Badung. Tirtayatra tahun 2013 ini diikuti para *sulinggih* dan *walaka*, diperkirakan 30 orang peserta dengan rincian 20 orang *sulinggih* dan 10 orang *walaka*. (kmb27/kmb37)

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal : 13



## Sidang Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa Saksi Ahli Pojokkan PA

SETELAH hakim ad hoc Hartono yang lemas dan sakit saat sidang dengan terdakwa Wayan Candra, Kamis (16/4) kemarin giliran jaksa penuntut umum (JPU) Suhadi yang tersungkur di Jalan Kapten Tantular, Denpasar Timur. Itu terjadi setelah sidang dengan pemeriksaan ahli dari Universitas Brawijaya diskors oleh hakim Tipikor pimpinan Hasoloan Sianturi. JPU Suhadi yang juga menjabat Kasi Intel Kejari Klungkung ini diseruduk motor ketika hendak menyeberang ke Kejati Bali, yang kantornya persis berada di depan Pengadilan Tipikor Denpasar.

Siang sekitar pukul 12.00 Wita, rombongan jaksa berjumlah sekitar enam orang berencana istirahat di Kejati Bali. Namun sial, Suhadi yang berjalan paling pinggir justru tertabrak dari arah selatan. Suhadi saat itu posisinya paling depan. Sedangkan orang yang menabrak adalah Nurman asal Praya, Lombok Tengah, NTB, yang saat itu mengendarai motor Honda Vario. Atas musibah itu, sejumlah temannya kaget dan langsung membantu sang jaksa dan juga si pengendara motor tadi. "Kepala saya

diserempet," ujar Suhadi sembari memegang kepalanya.

Sementara pengendara motor Nurman mengatakan tidak melihat ada orang yang menyeberang. Pedagang es di kawasan Renon ini mengaku kaget dan tidak bisa menghindari pejalan kaki yang merupakan rombongan jaksa.

Sementara dalam sidang, ahli yang dihadirkan adalah ahli agraria dari Universitas Brawijaya Malang Iwan Permadi dan ahli keuangan negara dari Universitas Patria Makassar Drs. Siswo Dianto dan mantan staf Pemkab Klungkung Ni Nyoman Setyawati.

Permadi menjelaskan terkait tata cara perhitungan harga tanah yang akan dibebaskan. Dia menegaskan, perhitungan tersebut wajib dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk. Sedangkan Siswo yang merupakan saksi ahli keuangan negara, memojokkan pengguna anggaran, dalam kasus ini adalah pihak Dinas Perhubungan.

Siswo menjelaskan, penanggung jawab dalam penggunaan keuangan negara adalah pengguna anggaran (PA) dan dinas terkait di bawahnya. Bupati bisa bertanggung

jawab langsung dengan penggunaan anggaran jika melakukan intervensi tertulis kepada PA. "Selama tidak melakukan intervensi apapun dalam bentuk tertulis,

itu semua menjadi tanggung jawab pengguna anggaran," tegasnya. Sementara yang menjadi PA dalam kasus ini adalah Dinas Perhubungan. (kmb37)

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal : 3



**Tolak Pengerukan Pasir untuk Teluk Benoa**

# Nelayan Demo Bupati

# Banyuwangi



DEMO - Nelayan Muncar demo ke Pemkab Banyuwangi menolak pengerukan pasir laut, Kamis (16/4) kemarin.

Bali Post/udi

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal : 1 dan 23



Sambungan.

**PERJUANGAN** nelayan Muncar, Banyuwangi menolak pengerukan pasir pantai untuk reklamasi Teluk Benoa terus berlanjut. Usai aksi gelang tanda tangan, mereka mendatangi Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (16/4) kemarin. Massa mendesak Bupati Banyuwangi Abdulah Azwar Anas secara tegas menolak rencana pengerukan pasir tersebut.

Aksi dilakukan dengan orasi di depan kantor Pemkab. Sejumlah poster bernada protes pengerukan pasir dibentangkan, termasuk dua spanduk besar berisi tanda tangan nelayan Muncar. Mereka juga membawa satu karung pasir laut sebagai bentuk protes rencana pengerukan pasir.

"Kami meminta Bupati Anas dengan tegas menolak rencana pengerukan pasir itu," kata Umar Hasan Zein, koordinator aksi.

Ia juga mengancam akan turun ke jalan bersama seluruh nelayan jika Bupati Banyuwangi memberikan rekomendasi pengerukan pasir pesisir untuk Teluk Benoa. Menurutnya, pengerukan pasir akan dilakukan di tiga titik pesisir, masing-masing wilayah Kabat, Rogojampi dan Muncar.

Pasir laut yang dikeruk dipastikan akan merusak perairan. Dampaknya, tangkapan ikan nelayan akan hilang, terutama di Muncar. Padahal, nelayan Muncar yang bergantung hidup dari laut mencapai 12.714 orang. Jumlah ini masih ditambah ribuan buruh yang mencari nafkah di 17 industri penepungan ikan, 13 industri pengalengan dan 27 unit pembekuan ikan.

Hal. 23

Berani Menolak

## Berani Menolak

### Dari Hal. 1

Dengan fakta ini, Hasan yang mewakili nelayan Muncar mendesak Bupati secara tegas dan berani menolak rencana itu. "Gubernur Jawa Timur secara tegas sudah berani menolak. Kenapa Bupati Anas belum," kritiknya.

Aksi kali ini diakhiri dengan menyerahkan spanduk berisi tanda tangan nelayan ke Bupati Banyuwangi. Sayangnya, mereka gagal bertemu Bupati. Massa hanya ditemui pejabat dari Kesbanglinmas Banyuwangi.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdulah Azwar Anas menegaskan pihaknya

akan memperhatikan aspirasi nelayan terkait rencana pengerukan pasir. "Ini akan menjadi bahan kajian amdal kami jika benar-benar ada rencana pengerukan pasir laut," tegasnya.

Bupati menambahkan, hingga detik ini belum ada investor yang resmi mengajukan izin pengerukan pasir, sehingga pihaknya belum mengetahui zona mana yang akan dikeruk investor.

Diberitakan sebelumnya, PT TWBI sempat mendatangi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Banyuwangi untuk mengajukan izin pengerukan pasir laut. Namun, ditolak dan diarahkan ke Pemprov Jawa Timur. (kmb30)

Hal. 2

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal

: 1 dan 23